

Ketika Pena Menjadi Barang Mewah: Transformasi Pendidikan Inklusif berbasis Inovasi Pemuda sebagai Pilar Akselerasi SDGs 2030 di Indonesia

Dennis Syafaa Aulia Afinda_2222240142_Pendidikan Bahasa Indonesia

Pendahuluan

Kisah pilu seorang anak sekolah dasar yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli pena dan buku merupakan tamparan keras bagi nurani bangsa. Peristiwa tersebut bukan sekadar permasalahan pribadi, melainkan cerminan kegagalan sistemik dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan. Di tengah komitmen global terhadap United Nations dan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Menurut Setyo (dalam Menpan, 2024) Indonesia telah menyatakan komitmennya dengan SDGs dan merupakan negara yang tertinggi di Asia yang berkomitmen serta menempati urutan ketujuh di dunia. Maka dari itu sudah sepatutnya untuk mewujudkan 17 tujuan pembangunan dan salah satunya tujuan mengenai pendidikan berkualitas (*quality education*). Tujuan ini menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas bagi semua. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses formal ke sekolah belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif dalam proses belajar.

Pendidikan inklusif yang seharusnya menjamin setiap anak tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau kondisi lainnya agar mendapatkan akses pendidikan yang setara, tetapi belum sepenuhnya terwujud. Permasalahan ini menuntut refleksi bersama: apakah sistem pendidikan kita benar-benar inklusif? Apakah negara telah memastikan bahwa kemiskinan tidak menjadi penghalang bagi anak untuk belajar? Esai ini akan mengkaji persoalan tersebut secara argumentatif dan analitis, serta menawarkan solusi transformatif yang berkelanjutan dalam kerangka SDGs Indonesia 2030.

Hasil dan Pembahasan

1. Representasi Ketimpangan Struktural dalam Akses Pendidikan

Sosiologi pendidikan merupakan analisis sosiologi yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan inti yang dihadapi dalam ranah pendidikan (Amanullah & Wantini, 2024:43). Sekolah tidak berdiri terpisah dari struktur sosial (*structural strain*). Ketimpangan ekonomi dalam masyarakat akan tercermin pada dinamika ruang kelas. Anak dari keluarga kurang mampu sering kali menghadapi hambatan tidak kasatmata berupa stigma, rasa malu, dan tekanan sosial. Ketika kebutuhan dasar seperti pena dan buku tidak terpenuhi, pengalaman belajar berubah menjadi sumber kecemasan.

Menurut teori kebutuhan dasar Abraham Maslow disusun dari yang paling mendasar hingga yang paling tinggi, menggambarkan hierarki lima tingkat kebutuhan manusia yang mencakup (1) Kebutuhan fisiologis (2) Kebutuhan keamanan (3) Kebutuhan sosial (4) Kebutuhan penghargaan (5) Kebutuhan aktualisasi diri (Maslow, 2019; Navy, 2020 dalam Sari, Permata, *et al* 2023:92). Kebutuhan fisiologis dan rasa aman harus terpenuhi sebelum individu dapat mencapai aktualisasi diri. Jika kebutuhan dasar seperti makanan dan perlengkapan sekolah belum terpenuhi, maka proses belajar tidak mungkin optimal. Dengan kata lain, kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejahteraan sosial.

Lebih jauh, dalam perspektif hak asasi manusia, pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional dan nasional. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Ketika seorang anak merasa terpinggirkan karena kemiskinan. Hal itu dapat menunjukkan adanya celah dalam mekanisme perlindungan sosial dan kebijakan pendidikan.

2. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif sering kali dipahami sebatas penyediaan akses bagi anak berkebutuhan khusus. Padahal, konsep inklusi jauh lebih luas. Hal ini

mencakup keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan bagi semua anak, termasuk yang berasal dari keluarga miskin. Pendidikan inklusif berarti menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, empati, dan bebas diskriminasi ekonomi. Pendidikan inklusif merupakan bentuk pemerataan dan perwujudan dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya memperoleh pendidikan yang sama tanpa diskriminasi (Sahrudin, Mirna *et al*, 2023:163).

Dalam kerangka SDGs 2030, pendidikan berkualitas bukan hanya soal kurikulum dan fasilitas fisik, tetapi juga kesejahteraan peserta didik. Tujuan pembangunan keempat menuntut kesetaraan kesempatan belajar dan penghapusan segala bentuk diskriminasi. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pembangunan yang kesatu yaitu tanpa kemiskinan (*no poverty*) dan tujuan pembangunan yang kesepuluh berkurangnya kesenjangan (*reduced inequalities*). Dengan demikian, persoalan ketidakmampuan membeli pena dan buku merupakan isu multidimensional yang memerlukan pendekatan lintas sektor.

Secara ekonomi, investasi pada pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Penelitian dalam ekonomi pembangunan menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar yang merata berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan mobilitas sosial. Oleh karena itu, penyediaan alat tulis gratis atau subsidi bukanlah beban anggaran, melainkan investasi sosial.

3. Kesenjangan Implementasi Kebijakan

Indonesia secara normatif telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang dijaga porsi belanjanya sebesar 20% dari APBN (Kemenkeu, 2025). Program bantuan seperti beasiswa dan bantuan operasional sekolah juga telah berjalan. Namun, tantangan utama terletak pada distribusi dan ketepatan sasaran. Data kemiskinan dan pendidikan sering kali tidak terintegrasi secara optimal, sehingga anak yang paling rentan justru luput dari bantuan.

Selain itu, sistem sekolah dasar di banyak daerah masih minim layanan konseling profesional. Guru belum sepenuhnya dibekali keterampilan untuk mendeteksi tekanan psikologis pada siswa. Budaya sekolah yang menuntut keseragaman

perlengkapan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi juga berpotensi memperkuat rasa minder pada siswa kurang mampu.

Kesenjangan implementasi ini menunjukkan perlunya inovasi berbasis teknologi dan partisipasi generasi muda untuk menjembatani celah antara kebijakan dan kebutuhan nyata.

4. Inovasi Pemuda: Aplikasi *KITA PINTAR* (Kolaborasi Inklusif untuk Transformasi Akses Pendidikan Nusantara).

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, generasi muda dapat menghadirkan inovasi digital berupa aplikasi bernama *KITA PINTAR* (Kolaborasi Inklusif untuk Transformasi Akses Pendidikan Nusantara). Aplikasi ini dirancang sebagai platform terpadu yang menghubungkan siswa rentan, sekolah, relawan, dan donatur dalam ekosistem pendidikan inklusif.

Fitur Utama Aplikasi *KITA PINTAR*:

1. Pemetaan kebutuhan *real-time*

Sekolah dapat menginput data siswa yang membutuhkan perlengkapan belajar. Sistem berbasis geolokasi memetakan kebutuhan secara transparan dan terverifikasi.

2. Donasi Mikro

Masyarakat dapat berdonasi mulai dari nominal kecil atau menyumbangkan alat tulis secara langsung. Transparansi laporan meningkatkan kepercayaan publik.

3. Peminjaman digital

Fitur peminjaman dan distribusi alat tulis melalui sistem QR *code* untuk menghindari stigma. Siswa dapat menerima bantuan secara anonim/tidak beridentitas.

4. Ruang Konseling Daring

Aplikasi menyediakan akses konseling psikologis gratis bagi siswa melalui kolaborasi dengan mahasiswa psikologi dan relawan profesional.

5. Dashboard SDGs

Data yang terkumpul dapat dianalisis untuk membantu pemerintah memetakan capaian tujuan pembangunan keempat SDGs secara lebih akurat dan berbasis bukti.

Melalui aplikasi ini, inovasi pemuda tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek (penyediaan alat tulis), tetapi juga memperkuat sistem pendukung pendidikan inklusif secara berkelanjutan.

5. Dampak Keberlanjutan dan Akselerasi SDGs 2030

Implementasi aplikasi *KITA PINTAR* memiliki potensi dampak berkelanjutan. (1) Aplikasi ini dapat membantu dan mendorong pemenuhan tujuan pembangunan keempat dengan memastikan akses setara terhadap kebutuhan belajar dasar. (2) Aplikasi ini mendukung tujuan pembangunan kesatu dan kesepuluh melalui pengurangan beban ekonomi keluarga miskin dan pengurangan kesenjangan sosial. (3) Inovasi ini memperkuat tata kelola pendidikan melalui transparansi data dan partisipasi publik. Prinsip *good governance* dan *evidence-based policy* dapat diwujudkan melalui integrasi data digital. (4) Kolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, kampus, dan komunitas menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan fleksibel. Investasi pada pendidikan inklusif dalam jangka panjang akan menghasilkan generasi yang lebih produktif dan berdaya saing. Dampak multiplikatif ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan Indonesia 2030.

Penutup

Aplikasi *KITA PINTAR* sebagai inovasi pemuda menawarkan solusi konkret dan berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan. Dengan teknologi, empati, dan partisipasi kolektif. Pena dan buku tidak lagi menjadi barang mewah, melainkan hak yang terjamin bagi setiap anak.

Ketika generasi muda mengambil peran sebagai inovator dan agen perubahan, maka akselerasi SDGs 2030 bukan lagi wacana, melainkan gerakan nyata menuju Indonesia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amanullah, W.A. and Wantini, W., 2024. *Analisis kesenjangan sosial di sekolah: Perspektif sosiologi pendidikan Islam (Studi kasus di SDN Bhayangkara Yogyakarta)*. Jurnal Dirosah Islamiyah, 6(1), pp.43-55.
<https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.4917>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), 2026. *Anggaran Pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun*. [online] Available at: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Anggaran-Pendidikan-2026-Sebesar-Rp757,8-Triliun> [Accessed 20 February 2026].

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), 2026. *Indonesia capai 62,5 persen target SDGs 2030 tertinggi di Asia*. [online] Available at: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/indonesia-capai-62-5-persen-target-sdgs-2030-tertinggi-di-asia> [Accessed 20 February 2026].

Sahrudin, M., Djafri, N. and Suling, A., 2023. *Pengelolaan pendidikan inklusif*. Jambura Journal of Educational Management, pp.162-179.
<https://doi.org/10.37411/jjem.v4i1.2313>

Sari, P., Pautina, M.R., Lakadjo, M.A., Ardhian, N.L. and Prasetyo, A., 2023. *Pandangan Teori Kebutuhan Dasar Abraham Maslow dan William Glasser tentang Fenomena Flexing*. Jambura Guidance and Counseling Journal, 4(2), pp.89-94.
<https://doi.org/10.37411/jgcj.v4i2.2764>

LAMPIRAN

Menu Tampilan 1.



Menu Tampilan 2.



Menu Tampilan 3.



Menu Tampilan 4.



Menu Tampilan 5.

